

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEMBATAAN
KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT (PPKM DARURAT) DALAM
PENANGANAN VIRUS CORONA DISEASE 2019 (COVID-19) DI
KECAMATAN GANTAR KABUPATEN INDRAMAYU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Dalam Menempuh Ujian Sidang Sarjana (S1)
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
PADA
Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Subang

Disusun Oleh :
JAJANG RAHMAT MAULANA
NPM : A1A.18.0019



**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS SUBANG
2022**

LEMBAR PENGESAHAN
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEMBATAAN
KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT (PPKM DARURAT) DALAM
PENANGANAN VIRUS CORONA DISEASE 2019 (COVID-19) DI
KECAMATAN GANTAR KABUPATEN INDRAMAYU
SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Dalam Menempuh Ujian Sidang Sarjana (S1)
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
PADA
Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Subang

Disusun Oleh:
JAJANG RAHMAT MAULANA
NPM : A1A.18.0019

Menyetujui
Pembimbing I

Mengesahkan
Ketua Program Studi

DR. H. IWAN HENRI KUSNADI, S.SOS, M.SI

LUKI NATIKA, SAP.,M.SI

Menyetujui
Pembimbing II

DRS. H. CICIN KUSNADI, M.SI

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Administrasi

DR . HJ. SILVY SONDARI G, S.P.SI.,MM

ABSTRAK

Jajang rahmat maulana 2022. Implementasi kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat (PPKM darurat) dalam penanganan virus corona disease 2019 (covid-19) di kecamatan gantar kabupaten indramayu, identifikasi masalah penelitian ini bagaimana dan faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan, covid – 19 singkatan dari *coronavirus disease* 2019 dapat diartikan penyakit menular yang menyerang saluran pernapasan, yang berasal di kota wuhan china, tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan implementasi kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat dalam penanganan virus corona disease 2019 (covid-19) di kecamatan gantar kabupaten indramayu.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif, yang berbasis pada informasi atau kenyataan yang terjadi di lapangan, dengan analisi data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dari penelitian ini menggunakan teori george edward iii merujuk pada 4 (empat) variabel diantaranya komunikasi, sumber daya, disposisi/ sikap, dan struktur birokrasi.

Hasil penelitian di kecamatan gantar kabupaten indramayu mengkonfirmasi kasus penularan covid-19 pertanggal 01 september 2021 – 26 febuari 2022 tercatat diagnosis kontak erat sebanyak 197 orang dan diagnosis suspek 45 orang. Total kasus dalam spesimen sebanyak 242 orang. Implementasi kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat (ppkm darurat) di kecamatan gantar kabupaten indramayu menunjukkan bahwa terimpelentasi dengan menggunakan pendekatan 4 (empat) variabel.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan Publik, PPKM

ABSTRACT

Jajang rahmat maulana 2022. Implementation of policy for enforcement of emergency community activity restrictions (PPKM emergency) in handling corona disease 2019 (covid-19) in gantar district, indramayu regency, identifying research problems how and what factors affect policy implementation, covid – 19 the abbreviation of coronavirus disease 2019 can be interpreted as an infectious disease that attacks the respiratory tract, originating in the city of wuhan, china, the purpose of this study was to determine the implementation of the policy on the implementation of the policy of restricting emergency activities in handling the corona disease 2019 (covid-19) virus in gantar district, indramayu regency.

In this study, the author uses a qualitative method, which is based on information or facts that occur in the field, with data analysis through observation, interviews, and documentation. The theory used in this study uses the theory of george edward iii, referring to 4 (four) variables, including communication, resources, attitudes, and bureaucratic structure.

The results of the study in gantar subdistrict, indramayu regency, confirmed cases of covid-19 transmission, dated 01 september 2021 – 26 february 2022, a total of 197 people diagnosed with close contacts and 45 suspected diagnoses. Total cases in the specimen amounted to 242 people. The implementation of the emergency community activity restriction policy (ppkm emergency) in gantar district, indramayu regency proves that it is implemented using a 4 (four) variable approach.

Keywords: Implementation, Public Policy, PPKM

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Saya Panjatkan Kehadirat Allah Swt Atas Segala Berkah, Rahmat Dan Hidayah-Nya Yang Selalu Diberikan Kepada Kita Semua, Termasuk Pada Nikmat Iman, Islam Dan Sehat Wal'afiat. Atas Berkah, Rahmat Dan Hidayah-Nya Pula, Maka Peneliti Dapat Menyelesaikan Skripsi Yang Berjudul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT (PPKM DARURAT) DALAM PENANGANAN VIRUS CORONA DISEASE 2019 (COVID-19) DI KECAMATAN GANTAR KABUPATEN INDRAMAYU”**.

Penyusunan Skripsi Ini Tidak Akan Selesai Dengan Baik, Tentunya Tidak Terlepas Dari Bantuan Serta Mendukung Peneliti Secara Moril Dan Materil. Maka Pada Kesempatan Yang Luar Biasa Ini, Peneliti Ingin Menyampaikan Ungkapan Terima Kasih Yang Tak Terhingga Kepada Beberapa Pihak, Sebagai Berikut:

1. Dr. Drs, Ir. H. A. Moeslihat Komara, M.Si, selaku Rektor Universitas Subang.
2. Dr. Silvy Sondari, S.Psi, MM, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang.
3. Luki Natika, S.AP., M.Si Selaku Ketua Program Studi Fakultas Ilmu Adminitrasi Universitas Subang.
4. Dr. H. Iwan Henri Kusnadi, S.Sos, M.Si, selaku Dosen Pembimbing I dalam Penulisan Skripsi ini yang telah membimbing dan memberikan arahan, petunjuk dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Drs. H. Cicin Kusnadi, M.Si, selaku Dosen Pembimbing II dalam Penulisan Skripsi yang telah membimbing dan memberikan masukan yang sangat berarti bagi penulis.
6. Seluruh staf akademik Fakultas Ilmu Administrasi yang telah membantu memperlancar proses penyusunan Skripsi ini.
7. Seluruh Pegawai Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu yang telah memberikan izin dan membantu kelancaran penelitian ini.
8. Keluarga tercinta yang tak henti memberikan doa, cinta dan kasih sayangnya serta motivasi dan dukungan moril maupun materil, dukungan dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-teman yang selalu tak henti memberikan dorongan motivasi dan menyempatkan waktunya untuk membantu penulis
10. Angkatan 2018 yang telah memberikan perhatian, motivasi dan pelajaran berharga kepada penulis selama masa perkuliahan.
11. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebut satu persatu.

Akhir kata, semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat dan Hidayah Nya dan juga membalas semua kebaikan dan ketulusan hati yang penulis dapatkan selama ini.

Indramayu, Juni 2022

Jajang Rahmat

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

NAMA : Jajang Rahmat Maulana

NPM : A1A.18.0019

PRODI : Administrasi Publik

FAKULTAS : Ilmu Administasi

ALAMAT : Desa mekarwaru RT/RW 02/01

Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak dapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini disebut dalam daftar pustaka.

Juni 2022

Jajang Rahmat
A1A.18.0019

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. DATA PRIBADI

- a. Nama : Jajang Rahmat Maulanna
- b. Tempat tanggal lahir : Indramayu, 20 Agustus 1999
- c. Agama : Islam
- d. Warga negara : Indonesia
- e. Jenis kelamin : Laki - laki
- f. Alamat : Desa Mekarwaru RT/RW 02/01
Kecamatan Gantar Kabupaten Indramaya
- g. Email : jajang.rahmat344@gmail.com

2. DATA KELUARGA

- a. Ayah : Elom Herry
- b. Ibu : Rumnasih Ningrum

3. RIWAYAT PENDIDIKAN

- a. Tahun 2011 : Lulus SD N 2 Gantar
- b. Tahun 2014 : Lulus SMP N 2 Gantar
- c. Tahun 2017 : Lulus SMK Kes. Bhakti Kencana Subang
- d. Tahun 2018 : Diterima Di Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Subang.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN.....	vi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	9
1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	9
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	9
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teoritis.....	11
2.1.1 Pengertian Administrasi publik	11
2.1.2 Pengertian Implementasi.....	12
2.1.3 Pengertian Kebijakan.	15
2.1.4 Definisi Implementasi Kebijakan.....	16
2.1.5 Konsep Implementasi.....	17
2.1.6 Model Implementasi Kebijakan Publik.....	19
2.1.7 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan.....	26
2.2 Kerangka Pemikiran.....	29
2.3 Hipotesis	30

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian.....	31
----------------------------	----

3.2	Penentuan Informan	31
3.3	Instrumen Penelitian	32
3.4	Teknik Pengumpulan Data	33
3.5	Validitas Data	35
3.6	Analisis Data.	35
3.7	Lokasi Penelitian	36
3.8	Rencana Jadwal penelitian.....	37

BAB IV HASIL PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Hasil Penelitian	38
4.1.1.	Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	38
4.1.2.	Tugas Pokok dan fungsi Kecamatan Gantar.....	40
4.1.3.	Visi Dan Misi Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu	42
4.1.4.	Keadaan Pegawai Kantor Kecamatan Gantar.....	43
4.1.5.	Jumlah penduduk Dikecamatan Gantar	46
4.2	Pembahasan	47
4.2.1	Komunikasi.....	48
4.2.2	Sumber daya	50
4.2.3	Disposisi/ Sikap pelaksana.....	51
4.2.4	Struktur Birokrasi	53

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A.	Kesimpulan.....	56
B.	Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.8 1 Jadwal Kegiatan Penelitian Skripsi	37
Tabel 4.1.1 1 Luas Wilayah Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu.....	39
Tabel 4.1.4 1 Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pada Kantor Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu	44
Tabel 4.1.4 2 Keadaan pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan Pada Kantor kecamatan Gantar Kabupaten indramayu	45
Tabel 4.1.4 3 Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Kantor Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu	46
Tabel 4.1.5 1 Jumlah Penduduk Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 1 Grafik Perkembangan Kasus Covid-19 Kabupaten Indramayu, Tahun 2022.....	5
Gambar 2.1.6 1 Model Implementasi Kebijakan Publik Edward III	20
Gambar 2.2 1 Kerangka Pemikiran	29
Gambar 4.1.2 1 Struktur Organisasi Kecamatan Gantar.....	40
Gambar 4.1.5 1 Data Kasus Covid-19 Di Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu	47

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat izin Penelitian Dari Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Indramyu.
2. Surat Keterangan Melaksanakan Penelitian Dari Kantor Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu.
3. Kartu Bimbingan.
4. Pedoman wawancara.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Covid - 19, singkatan dari *Coronavirus Disease 2019* yang dapat diartikan sebagai penyakit menular yang menyerang saluran pernapasan, yang berasal dan pertama kali muncul di kota Wuhan China pada akhir Desember 2019 dan telah menyebar dengan cepat ke berbagai belahan dunia. Pandemi ini mempengaruhi berbagai perubahan di sektor sosial, ekonomi hingga kondisi alam. Virus corona telah mengubah cara hidup dan kondisi masyarakat. Manusia merupakan makhluk sosial yang memungkinkan saling berinteraksi secara langsung sehingga tingkat penyebaran pandemi covid-19 semakin pesat.

Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit menular, mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya dua jenis Corona virus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Corona virus Disease 2019 (Covid-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus Covid -19 ini dinamakan *Sars-Cov-2*. Virus Corona ini adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia). Penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak (civet cats) ke manusia dan MERS dari unta ke manusia. Adapun hewan yang menjadi sumber penularan Covid-19 ini, analisis genetik menunjukkan tipe virus yang saat ini mewabah 96% mirip dengan *coronavirus* pada kelalawar.

Fenomena pandemi COVID-19 yang diawali pada 31 Desember 2019, dimana (WHO) *World Health Organization* China County Office melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Yang kemudian pada tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifikasi pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya tersebut sebagai jenis baru coronavirus. Pada awal Tahun 2020 mulai menjadi pandemi global dan menjadi masalah kesehatan di beberapa negara di luar (RRC) Republik Rakyat China, berdasarkan *World Health Organization* (WHO) kasus pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan telah menjadi permasalahan kesehatan diseluruh dunia.

Menurut Undang-undang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat (3) Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) “Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dapat mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah tertentu”.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang disebut dengan (PPKM) merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Republik Indonesia untuk memerangi pandemi Covid-19 yang sebelumnya, pemerintah sempat memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berlangsung di beberapa wilayah di Indonesia. Hal ini dilaksanakan karena adanya

inisiatif dari pemerintah daerah. Sedangkan kebijakan PPKM ini dilakukan serentak atas dasar komando pemerintah pusat.

Keluarnya Surat Edaran (PPKM Darurat) Covid-19 itu tidak terlepas dari Instruksi Menteri Dalam Negeri (INMENDAGRI) No. 15/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat) Covid - 19 di wilayah Jawa dan Bali. PPKM pertama kali diberlakukan pada 11 Januari samapi dengan 25 Januari 2021 lalu tepatnya di tujuh provinsi di Pulau Jawa, diantaranya DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Seiring berjalannya waktu serta menyesuaikan keadaan dari masing-masing wilayah di Indonesia, maka PPKM dilakukan secara berkelanjutan mulai dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, hingga skala Nasional. Istilah-istilah PPKM pun mulai bermunculan dari yang semula PPKM Jilid Pertama, Kedua, berbasis Mikro, hingga PPKM Darurat.

Pada 21 Juli 2021 lalu, Tito Karnavian, selaku Menteri Dalam Negeri mengumumkan istilah baru terkait mekanisme PPKM dengan skala tingkat pertama hingga keempat (Level I - IV). Pemerintah memutuskan suatu wilayah dapat memberlakukan PPKM antara level I - IV dengan tolak ukurnya berdasarkan laju penularan serta jumlah kasus aktif Covid-19 di wilayah tersebut. Khususnya di kabupaten indramayu menerapkan PPKM darurat Level III. Berikut aturan yang diterapkan bagi daerah PPKM level III:

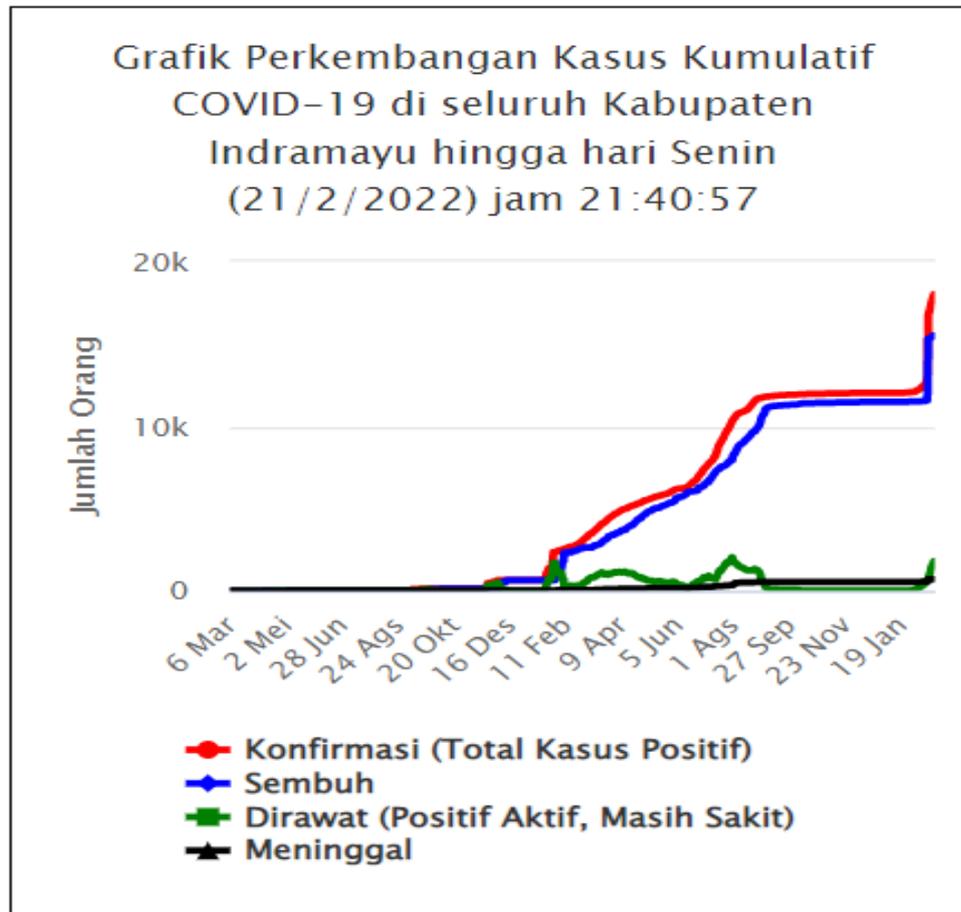
1. Pekerjaan non-esensial kerja dari rumah atau work from home (WFH)
2. Pekerjaan esensial beroperasi 100 persen dengan dibagi menjadi 2 shift dengan protokol kesehatan ketat

3. Toko atau pasar kebutuhan sehari-hari bisa buka dengan kapasitas 50 persen dan tutup pukul 20.00
4. Pasar rakyat selain kebutuhan sehari-hari bisa buka dengan kapasitas 50 persen dan tutup pukul 15.00
5. Pusat perbelanjaan seperti mall dan plaza bisa buka dengan kapasitas 25 persen dan tutup pukul 17.00
6. Pedagang kaki lima (PKL), barbershop dan sejenisnya bisa buka sampai pukul 20.00
7. Warung makan, PKL, lapak jajanan di ruang terbuka boleh beroperasi dengan kapasitas 25 persen dan buka hingga pukul 20.00. Sementara pengunjung yang makan di tempat diberi batas waktu maksimal 30 menit.
8. Restoran di ruang tertutup hanya melayani take away/delivery
9. Kegiatan belajar mengajar 100 persen daring
10. Tempat ibadah dibuka dengan kapasitas 25 persen dan protokol kesehatan ketat.

PPKM level 3 artinya, perlu diketahui PPKM singkatan dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Sebagaimana fungsinya, PPKM bertujuan untuk membatasi mobilitas masyarakat agar virus COVID-19 dapat diminimalisir.

Sementara itu, mengacu rekomendasi World Health Organization (WHO), PPKM level 3 artinya menunjukkan angka kasus positif COVID-19 berkisar 50-150 orang per 100 ribu penduduk per minggu.

Gambar 1.1 1 Grafik Perkembangan Kasus Covid-19 Kabupaten Indramayu, Tahun 2022



Sumber: https://m.andrafarm.com/_andra.php?_i=daftar-co19-kota&noneg=78-9&urut=1&asc=01100000000

Berdasarkan data dari kemkes.go.id, covid19.go.id, BNPB (Badan Penanggulangan Bencana), hingga Senin (21/2/2022) jam 21:40:57, jumlah yang positif terinfeksi virus corona di Kabupaten Indramayu mencapai 18.006. Sedangkan yang meninggal disebabkan Covid-19 sebanyak 706 orang, dan 1.794 masih dirawat (positif aktif), serta 15.506 orang dinyatakan sembuh.

Berdasarkan Surat edaran (Peraturan Bubapti Indramayu) PERBUP Indramayu NOMOR: 443/Kep. 291-Dinkes/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Indramayu. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Corona Virus Disease* 2019 Diwilayah Jawa Dan Bali, dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep. 337-Hukham/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM) *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Di Daerah Provinsi Jawa Barat, maka perlu menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Dalam Penanganan Coronavirus Disease 2019 di Kabupaten Indramayu.

Dalam surat edaran bupati indramayu menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat) Dalam Penanganan CoronaVirus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Indramayu. PPKM Darurat sebagaimana dimaksud pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan dilakukan secara daring/online; pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) *Work From Home* (WFH).

Surat edaran ini yang ditanda tangani oleh Nina Agustina tersebut ditujukan kepada kapala OPD (Organisasi Perangkat Daerah), BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), intansi, para camat, kades, dan lurah, para pelaku usaha dan masyarakat, dalam Surat Edaran tersebut diminta untuk meningkatkan penegakan disiplin

protokol kesehatan. Kepada para Camat, Kades Dan Lurah Terhadap Satgas Penanganan Covid-19 melakukan pengawasan terhadap penerapan ketentuan PPKM Darurat melakukan upaya atau kegiatan untuk lebih mengintensifkan disiplin pelaksanaan protokol kesehatan (menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau handsanitizer, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas dan menghindari makan bersama) kepada seluruh lapisan masyarakat. Berbagai solusi atau kebijakan telah diupayakan pemerintahan, seperti perilaku (3M), yaitu memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan. tetapi mengubah perilaku individu dari masyarakat ternyata tidaklah mudah. Banyak masyarakat yang masih mengacuhkan atau meremehkan peringatan pemerintah. Bukan tanpa sebab bahkan ada masyarakat yang belum begitu percaya akan adanya Covid-19, tidak banyak dari mereka yang beranggapan Covid-19 hanyalah permainan politik walaupun sudah banyak korban yang berjatuhan, untuk itu perlu pemahaman lagi bagi masyarakat agar mereka memahami bahayanya Covid-19.

Adanya Pemikiran Masyarakat Ini Muncul Karena Masyarakat Merasa Terbebani Dengan Banyaknya Kebijakan-Kebijakan Pemerintah Yang Membatasi Aktivitas Masyarakat Sehingga Dari Masyarakat Banyak Yang Merasa Pemerintah Membendung Mata Pencarian Masyarakat.

Bahkan Ada Beberapa Masyarakat Beranggapan New Normal Adalah Keadaan Yang Normal Tanpa Covid-19 Bahkan Ada Yang Mengabaikan Ajuran Pemerintah Untuk Divaksin, Sosial Distancing Dan Physical Distancing Bisa Dibilang Untuk Menjaga Jarak Sampai 1 Meter Jauhnya, Tidak Memakai Masker

Saat Keluar Rumah. Padahal Adanya New Normal Ini Masyarakat Diberikan Kelonggaran Untuk Tetap Melakukan Aktivitas Tapi Hanya Ditambahkan Sedikit Peraturan Untuk Menjaga Kesehatan Agar Penyebaran Covid-19 Dapat diperkecil.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, ditemukan permasalahan terkait dengan implementasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM DARURAT) Dalam Penanganan Virus Corona Disease 2019 (Covid-19) Di Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu diantaranya sebagai berikut :

1. Keterbatasan daya dukung untuk menunjang tugas-tugas satgas dalam penanganan virus corona masih terbatas seperti masker, spanduk sosialisai dan lain-lain
2. Sikap para pelaksana (implementor) masih kurang responsip untuk melayani kebutuhan peralatan (masker, hand sanitizer) ditempat atau instansi yang ada.
3. Birokrasi yang berbelit, lamban dalam merespon, dan ragu-ragu dalam penanganan Covid-19

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, dengan mengangkat judul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT (PPKM DARURAT) DALAM PENANGANAN VIRUS CORONA DISEASE 2019 (COVID-19) DI KECAMATAN GANTAR KABUPATEN INDRAMAYU.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan permasalahan pada latar belakang penelitian, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Dalam Penanganan Virus Corona Disease 2019 (Covid-19) Di Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Dalam Penanganan Virus Corona Disease 2019 (Covid-19) Di Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu?

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan Implementasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Dalam Penanganan Virus Corona Disease 2019 (Covid-19) Di Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Dalam Penanganan Virus Corona Disease 2019 (Covid-19) Di Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan Permasalahan Yang Menjadi Fokus Penelitian Dan Tujuan Yang Ingin Dicapai, Maka Manfaat Yang Diharapkan Dari Adanya Penelitian Ini Adalah:

1. Kegunaan Teoritik

Penelitian Ini Adalah Untuk Mengembangkan Ilmu Administrasi Publik Pada Umumnya, Dan Secara Khusus Mengkaji Tentang Implementasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Dalam Penanganan Virus Corona Disease 2019 (Covid-19) Di Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu Sehingga Berguna Untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan Secara Umum.

2. Secara Praktis

Diharapkan Penelitian Ini Dapat Berguna Sebagai Masukan Bagi Kantor Camat Di Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu Termasuk Pihak-Pihak Yang Terkait Seperti Dilingkungan Dinas Intansi Pemerintahan Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat Dan Pemerintahan Pusat.

BAB II

TINJAUAN LITERATUR

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 Pengertian Administrasi publik

Secara etimologis pengertian administrasi (Silalahi, 2016:2) istilah administrasi berasal dari bahasa Inggris dari kata *Administration* yang bentuk infinitifnya adalah *to manager*. Dalam *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English* (1974), kata *to-administer* diartikan sebagai *to manage* (mengelola) atau *direct* (menggerakkan). Kata *Administrasi* juga berasal dari bahasa Belanda dari kata *administratie* yang mempunyai pengertian yang mencakup *stelselmatige verkringingen verwerking van gegevens* (tatausaha), *bestuur* (manajemen dari kegiatan-kegiatan organisasi), dan *beheer* (manajemen dari sumber daya, seperti finansial, personel, gudang). Istilah, pengertian dan hakikat administrasi di Indonesia pada mulanya berasal dari Eropa Barat atau Eropa Kontinental melalui penjajahan Belanda (Belanda merupakan salah satu negara Eropa Kontinental). Eropa Barat seperti halnya yang sama juga di Jerman, Prancis, Italia, memperolehnya dari bangsa Romawi.

A. Administrasi Dalam Arti Sempit

Administrasi dalam arti sempit merupakan penyusunan dan pencacatan data dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam

hubungan satu sama lain. Data dan informasi yang dimaksud berhubungan dengan aktivitas organisasi, baik untuk kepentingan intern disebut ekstern. Administrasi dalam arti sempit inilah yang sebenarnya lebih tepat disebut tatausaha (*clerical work / office work*).

B. Administrasi dalam Arti Luas

Administrasi dalam arti luas adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu disebut Administrasi. Untuk dapat memahami arti administrasi dalam arti luas, perhatikan definisi-definisi berikut ini.

Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu. (The Liang Gie, 1980)

Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha kerja sama demi tercapainya tujuan yang ditentukan sebelumnya (Sondang P Siagian, 1980).

2.1.2 Pengertian Implementasi

Implementasi berasal dari kata "*to implement*" yang berarti mengimplementasikan. Arti implementasi ialah kegiatan yang dilakukan melalui perencanaan dan mengacu pada aturan tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut. Implementasi juga berarti penerapan atau pelaksanaan. Jadi, implementasi adalah tindakan untuk menjalankan rencana yang telah dibuat. Dengan demikian,

implementasi hanya dapat dilakukan jika terdapat sebuah rencana. Hasil implementasi akan maksimal jika penerapan dilakukan sesuai rencana sebelumnya. Akhirnya implementasi bermuara pada sistem atau mekanisme.

Pemahaman tentang implementasi dapat dihubungkan dengan suatu peraturan atau kebijakan yang berorientasi pada kepentingan khalayak ramai atau masyarakat. Suatu kebijakan akan terlihat kemanfaatannya apabila telah dilakukan implementasi terhadap kebijakan tersebut. Implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan peraturan atau kebijakan, dan adapun pengertian implementasi tersebut adalah sebagai berikut:

Menurut Oktasari (2015:1340), Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Meter dan Horn (Ratri, 2014:4), menyatakan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Dimana berarti bahwa proses implementasi tidak akan terlaksana sebelum undang-undang atau peraturan ditetapkan serta dana disediakan guna membiayai proses implementasi kebijakan tersebut. Disisi lain implementasi kebijakan dianggap sebagai fenomena

yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, output maupun sebagai hasil.

Implementasi menurut teori Jones (Mulyadi, 2015:45): “Those Activities directed toward putting a program into effect” (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya), sedangkan menurut Horn dan Meter: “Those actions by public and private individual (or group) that are achievement or objectives set forth in prior policy” (tindakan yang dilakukan pemerintah). Jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Selanjutnya menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan.
2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
3. Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.

2.1.3 Pengertian Kebijakan.

Istilah kebijakan secara etimologi berasal dari Bahasa Inggris "*policy*". Akan tetapi, kebanyakan orang berpandangan bahwa istilah kebijakan senantiasa disamakan dengan istilah kebijaksanaan. Padahal apabila dicermati berdasarkan tata bahasa.

Kebijakan menurut pendapat Carl Friedrich (Leo Agustino, 2008:7) adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan dan umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang diinginkan.

Hal tersebut berarti kebijakan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Apabila kebijakan berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan tersebut akan mendapat kendala ketika diimplementasikan. Sebaliknya, suatu kebijakan harus mampu mengakomodasikan nilai-nilai dan praktik-praktik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

2.1.4 Definisi Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan yaitu aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat. Tahap implementasi kebijakan dapat dicirikan dan dibedakan dengan tahap pembuatan kebijakan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008: 65), mengatakan bahwa:

“Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.

Menurut Edward III (Mulyadi, 2015:47), “implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcome bagi masyarakat”. Sedangkan menurut Wahab (Tahir, 2014:55), bahwa implementasi kebijakan adalah: pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/ sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/ mengatur proses implementasinya.

2.1.5 Konsep Implementasi.

Berbicara tentang konsep implementasi, semakin banyak dibahas pada dekade ini karena konsep implementasi dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan publik yang akan menjadi acuan kinerja para pelaksana kebijakan. Perumusan kebijakan publik tidak dapat terlepas dari implementasi kebijakan yang digunakan sebagai acuan bersama sebelum kebijakan publik ditetapkan. Implementasi merupakan tahap yang sangat menentukan dalam setiap proses perumusan kebijakan publik, hal tersebut dikemukakan oleh Edward III bahwa tanpa adanya implementasi yang baik terhadap perumusan kebijakan maka kebijakan tersebut tidak akan berhasil pula. Munculnya implementasi dikarenakan

adanya pengarahan atau instruksi yang sah dari kebijakan publik yang dibuat yang nantinya akan memberikan manfaat kepada masyarakat.

Berdasarkan pernyataan di atas, sebelum adanya implementasi kebijakan harus dirumuskan terlebih dahulu terkait kebijakan yang akan dilaksanakan. Pengelolaan *input* atau kebijakan yang akan dirumuskan sangat harus dilakukan karena berkaitan langsung dengan *ouput* atau *outcomes* bagi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, perlu adanya kegiatan yang terencana dari proses awal hingga akhir guna tercapainya tujuan yang diinginkan dari adanya suatu kebijakan tersebut. Berbicara mengenai implementasi, tidak luput dari kata kebijakan karena saling berkaitan antara implementasi dan kebijakan. Kebijakan diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat dengan tujuan yang telah disepakati bersama.

Menurut Fredrickson dan Hart menjelaskan bahwa :

“Kebijakan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan”.

Pengertian tentang kebijakan juga dijelaskan menurut Woll yaitu merupakan aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Menurut M. Irafan Islamy berpendapat tentang kebijakan publik yaitu sebagai berikut :

“Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang

menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak dan demi kepentingan rakyat”.

Adapun kebijakan publik menurut George C. Edward III dan Shakansky mengungkapkan “apa yang di katakan dan apa yang dilakukan oleh pemerintah atau apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah adalah tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran dari program pelaksanaan niat dan peraturan-peraturan”

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa setiap kebijakan publik tentunya melibatkan beberapa pihak yang saling berkesinambungan tergantung dari tujuan dari kebijakan publik tersebut di rumuskan atau dibuat. Dengan kata lain, tentunya ada kepentingan tersendiri dari pembuat kebijakan publik untuk memberikan pengaruh baik terhadap masyarakat.

2.1.6 Model Implementasi Kebijakan Publik

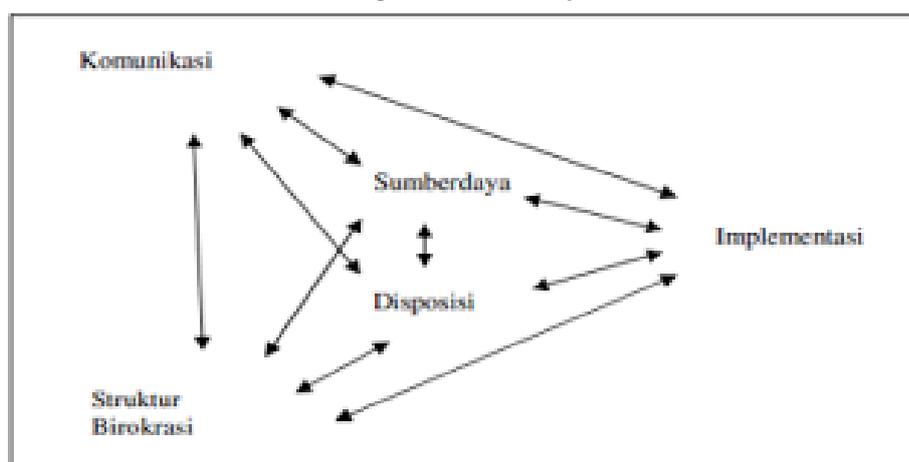
Implementasi kebijakan publik memiliki beberapa model yang menjadi acuan dalam merancang dan melaksanakan kebijakan tersebut. Adapun model-model implementasi kebijakan publik yang telah adalah secara teori adalah sebagai berikut.

Menurut Matland (Hamdi, 2014:98), literatur mengenai implementasi kebijakan secara umum terbagi dalam dua kelompok, yakni kelompok dengan pendekatan dari atas (*top-down*) dan kelompok dengan pendekatan dari bawah (*bottom-up*). Kelompok dengan pendekatan *top-down* melihat perancang kebijakan sebagai aktor sentral dalam implementasi kebijakan.

Model George C. Edwards III (Tahir, 2014:61-62) Di dalam pendekatan studi implementasi kebijakan pertanyaan abstraknya dimulai dari bagaimana pra kondisi untuk suksesnya kebijakan publik dan kedua adalah apa hambatan utama dari kesuksesan kebijakan publik.

Edwards III menawarkan dan mempertimbangkan empat faktor dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yakni: *Communication, Resources, Disposition or Attitudes, and Bureaucratic Structure*. Menjelaskan empat faktor dimaksud yakni, komunikasi, sumberdaya, sikap pelaksana, struktur birokrasi.

Gambar 2.1.6 1 Model Implementasi Kebijakan Publik Edward III



Model implementasi kebijakan yang bersifat *top-down* menurut George C.

Edward III, yaitu:

“Ada 4 (empat) variable yang sangat menentukan untuk keberhasilan dari suatu implementasi kebijaka publik, dianatanaya adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Selain itu, melalui empat faktor ini kemudian akan dapat diidentifikasi hambatan dalam mencapai keberhasilan dari suati proses pelaksanaan kebijakan”.

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan kebijakan publik nantinya. Tidak hanya itu, sebelum adanya kebijakan publik yang sah tentunya harus melalui komunikasi terlebih dahulu agar dapat diketahui arah dan tujuan dari kebijakan publik yang dirumuskan. Komunikasi dalam implementasi kebijakan berkaitan dengan pelaksana kebijakan atau pembuat kebijakan memahami atau mengetahui tugas dan fungsinya masing-masing. Dengan mengetahui peran dan fungsinya masing-masing tentunya dapat memudahkan berjalannya suatu kebijakan yang dilaksanakan.

Menurut Edward III, komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi lain, antara lain :

“Dimensi Transmisi (*Transmission*), Dimensi Kejelasan (*Clarity*), Dimensi Konsistensi (*Consistency*). Dimana dimensi tersebut saling berhubungan yang nantinya dapat memperlancar berjalannya suatu komunikasi dalam implementasi kebijakan.”

Dimensi Transmisi (*Transmission*), dimana pada dimensi ini kebijakan publik yang ada harus diketahui oleh seluruh masyarakat yang menjadi sasaran di dalamnya. Dengan kata lain, pelaksana dari kebijakan tersebut harus menginformasikan kepada masyarakat terkait agar masyarakat mengetahui dan memahami maksud dari kebijakan publik tersebut. Dengan harapan tidak adanya miss komunikasi antara pejabat pelaksana kebijakan publik dan juga masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan publik tersebut. Selanjutnya, Dimensi Kejelasan (*Clarity*), kejelasan disini diartikan sebagai bagaimana pejabat pelaksana program menjelaskan terkait maksud dan tujuan dari kebijakan yang sudah dirumuskan.

Penjelasan terkait kebijakan publik yang ada ditujukan kepada masyarakat atau pihak lain yang memiliki peran dalam kebijakan publik tersebut. Tentunya, penyampaian kejelasan harus disampaikan secara langsung agar menghindari selisih paham antara pihak satu dengan pihak lainnya.

Selain itu, dimensi konsistensi (*Consistency*) juga harus dilakukan, agar kebijakan publik yang ada dapat dijadikan acuan bersama dalam implementasi kebijakan nantinya. Dalam artian, implementasi kebijakan publik yang sudah dirumuskan tidak keluar dari apa yang sudah di rencanakan sebelumnya. Sehingga, hasil dari kebijakan publik yang dilaksanakan sesuai dengan harapan dan keinginan pembuat kebijakan, serta kebijakan publik tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien.

2. Sumberdaya

Menurut Edward III, variable selanjutnya yang menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan yaitu sumberdaya. Sumberdaya sendiri diartikan sebagai berikut :

“Perintah-perintah suatu kebijakan mungkin sudah dikomunikasikan secara tepat, akurat dan konsisten akan tetapi jika pelaksana dari implementasi kebijakan kekurangan sumber-sumber daya yang diperlukan maka implementasi kebijakan cenderung tidak efektif. Dengan demikian sumberdaya merupakan sesuatu variable yang penting dalam pelaksanaan implementasi kebijakan”.

Sumber daya yang dimaksud disini meliputi (A) Sumberdaya Manusia, (B) Sumberdaya Anggaran, (C) Sumberdaya Peralatan, dan (D) Sumberdaya Kewenangan:

A) Sumberdaya manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Edward III menyatakan bahwa “*probably the most essential resources in implementing policy is staff*”. Dengan pernyataan tersebut, sudah jelas bahwa sumberdaya yang paling penting dalam menjalankan suatu kebijakan yaitu staf. Jika seorang staf tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik maka implementasi kebijakan tidak dapat berjalan dengan efektif.

B) Sumberdaya anggaran

Edward III menyatakan bahwa terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Terbatasnya insentif yang diberikan kepada implementator merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan program. Sehingga Edward III menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan juga rendah.

C) Sumberdaya peralatan

Edward III menyatakan bahwa sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan

dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Fasilitas fisik seperti yang disebutkan di atas juga menjadi sumberdaya penting dalam implementasi kebijakan, tidak cukup dengan hanya memiliki seorang staf yang memadai, dapat memahami apa yang seharusnya dilakukan, dll.

D) Sumberdaya kewenangan (*Authority*)

Edward III menyatakan bahwa kewenangan (*authority*) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga tersebut dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan. Oleh karena itu, pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya.

3. Disposisi

Menurut Edward III variabel ke tiga yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan yaitu disposisi, yang diartikan sebagai berikut :

“Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor yang sangat penting ke tiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya sesuai dengan bidangnya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias”.

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan yaitu a) Pengangkatan Birokrasi dan b) Insentif.

a) Pengangkatan birokraksi

Disposisi atau sikap pelaksanaan akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personal yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat di atasnya. Oleh karena itu, pengangkatan dan pemilihan personal pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.

b) Insentif

Insentif merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Oleh karena itu, menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

4. Struktur birokrasi

Edward III variabel ke empat yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan yaitu struktur birokrasi, yang diartikan sebagai berikut:

“Birokrasi merupakan salah satu jenis organisasi atau lembaga yang sering bertindak sebagai pelaksana kebijakan. Meskipun sumber daya sudah

tersedia, pelaksana kebijakan paham akan apa yang menjadi tanggung jawabnya dan mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya namun implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif ketika struktur organisasi pelaksana kebijakan tidak efisien. Struktur birokrasi seharusnya mencakup aspek seperti pembagian wewenang, hubungan antara unit-unit organisasi, dan sebagainya”.

Menurut Edward III terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi, yakni : *Standard Operational Procedure* (SOP) dan Fragmentasi. SOP merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas. SOP juga sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi.

2.1.7 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Dalam implementasi terdapat berbagai faktor-faktor yang akan mempengaruhi terlaksananya kegiatan atau kebijakan. Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi telah banyak dikemukakan oleh para ahli.

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni: (1) standar dan sasaran kebijakan; (2) sumberdaya; (3) komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas; (4) karakteristik agen pelaksana; (5) disposisi implementor; (6) kondisi sosial, ekonomi dan politik.

1. Standar dan sasaran kebijakan.

Setiap kebijakan public harus mempunyai standard an suatu sasaran kebijakan jelas dan terukur. Dengan ketentuan tersebut tujuannya dapat terwujudkan. Dalam standard an sasaran kebijakan tidak jelas, sehingga tidak bias terjadi multi-interpretasi dan mudah menimbulkan kesalah-pahaman dan konflik di antara para agen implementasi.

2. Sumber daya.

Dalam suatu implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya materi (*matrial resources*) dan sumberdaya metoda (*method resources*). Dari ketiga sumberdaya tersebut, yang paling penting adalah sumberdaya manusia, karena disamping sebagai subjek implementasi kebijakan juga termasuk objek kebijakan publik.

3. Hubungan antar organisasi.

Dalam banyak program implementasi kebijakan, sebagai realitas dari program kebijakan perlu hubungan yang baik antar instansi yang terkait, yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program tersebut. Komunikasi dan koordinasi merupakan salah satu urat nadi dari sebuah organisasi agar program-programnya tersebut dapat direalisasikan dengan tujuan serta sasarannya.

4. Karakteristik agen pelaksana.

Dalam suatu implementasi kebijakan agar mencapai keberhasilan maksimal harus diidentifikasi dan diketahui karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu program kebijakan yang telah ditentukan.

5. Disposisi implementor.

Dalam implementasi kebijakan sikap atau disposisi implementor ini dibedakan menjadi tiga hal, yaitu; (a) respons implementor terhadap kebijakan, yang terkait dengan kemauan implementor untuk melaksanakan kebijakan publik; (b) kondisi, yakni pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan; dan (c) intens disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki tersebut.

6. Kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi.

Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

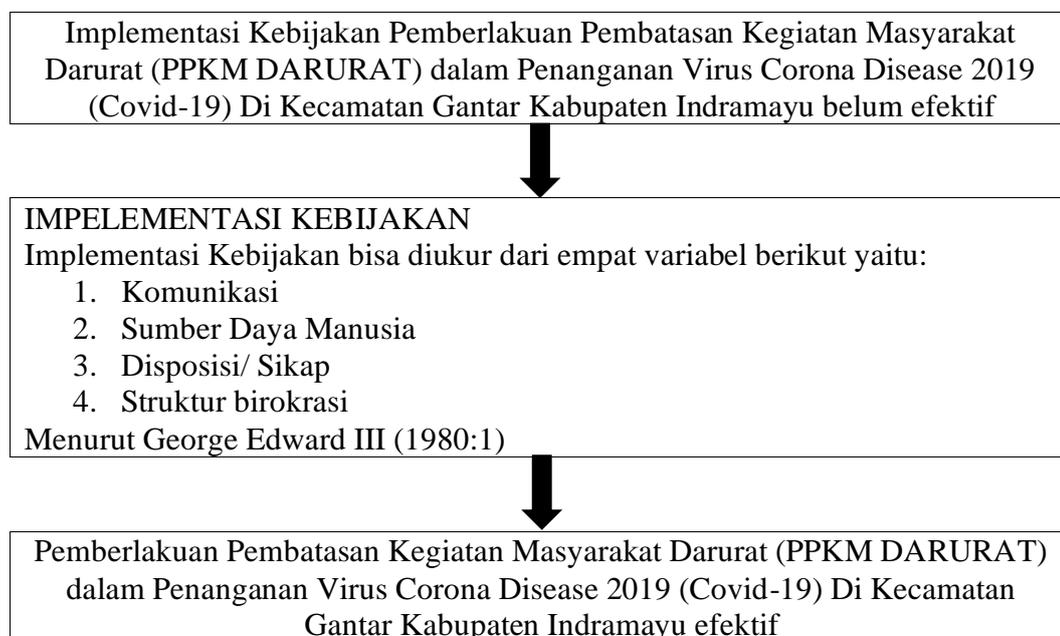
2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam Penelitian Ini, Peneliti Bermaksud Menguji Dampak Covid-19 Terhadap Implementasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Dalam Penanganan Virus Corona Disase 2019

Adanya Pemikiran Ini Muncul Karena Masyarakat Merasa Terbebani Dengan Banyaknya Kebijakan-Kebijakan Pemerintah Yang Membatasi Aktivitas Masyarakat Sehingga Dari Masyarakat Banyak Yang Merasa Pemerintah Membendung Mata Pencarian Masyarakat. PPKM Darurat Merupakan Hal Yang Sangat Penting Karena Dapat Menjaga Kesehatan Masyarakat Agar Penyebaran Covid-19 Dapat Diperkecil.

Berdasarkan uraian diatas , maka dapat digambarkan kerangka pemikiean sebagai berikut.

Gambar 2.2 1 Kerangka Pemikiran



2.3 Hipotesis

Sesuai dengan anggapan dasar dalam alur kerangka pikir penelitian maka penulis merumuskan Hipotesis “Implementasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM DARURAT) Dalam Penanganan Virus Corona Disease 2019 (Covid-19) Di Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu” akan optimal bila didasarkan pada : Komunikasi, Sumber Daya Manusia, Disposisi dan Struktur birokrasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2007:9) Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode Kualitatif, yang berbasis pada informasi atau kenyataan yang terjadi dilapangan. Adapun prosedur-prosedur pada metode kualitatif yaitu: pengambilan informan secara sengaja, pengumpulan data terbuka, analisis teks atau gambar, penyajian informasi dalam bentuk gambar dan tabel, serta interpretasi pribadi atas temuan-temuan dalam penelitian.

3.2 Penentuan Informan

Dalam hal ini penulis memilih informan di kecamatan gantar Kabupaten Indramayu pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) Pada kantor Camat Di kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu sebagai berikut :

1. Informan Kunci (*Key Informan*) adalah camat kecamatan gantar kabupaten indramayu. Dipilih karena dipandang sebagai informan yang mengetahui informasi tentang implementasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Masyarakat Darurat di kecamatan gantar.
2. Satuan tugas atau satgas kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu.
3. Masyarakat atau stakeholders terkait.

3.3 Instrumen Penelitian

Pendekatan ini bersifat kualitatif sehingga informasi yang paling penting adalah peneliti itu sendiri, karena peneliti yang bertugas menyusun atau merekomendasikan alat (instrumen), jadi harus memahami segala hal yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Instrumen pengambilan data menentukan kualitas perolehan data yang dikumpulkan.

1. Pedoman Wawancara Terhadap Objek Yang Dihubungkan Dengan Masalah Yang Akan Diteliti Tentang Dalam Implementasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* Di Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu.
2. Catatan sistematis disusun pada saata dilakukan observasi dilapangan yang dapat membantu untuk merakam berbagai hal berhubungan dengan Implementasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* Di Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pada dasarnya data merupakan sekumpulan informasi atau juga keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu. data yang diperoleh tersebut dapat menjadi sebuah anggapan atau fakta yang disebabkan memang belum dilolah dengan lebih lanjut.

1. Data Premier

Data premier adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan atau data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditangani. data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. data dapat dikumpulkan dengan cepat. yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah literatur, artikel, jurnal, serta situs internet yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. data sekunder dapat dipperjelas dengan antara lain:

- a. Studi Kepustakaan, adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, jurnal, makalah ilmiah, dan artikel yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

b. Studi Lapangan, adalah penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek yang diteliti untuk memperoleh data primer. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan sebagai berikut:

A. Observasi

Adalah pengumpulan data dalam penulisan laporan penelitian dengan melalui pengamatan langsung, dengan cara ini akan diperoleh data dan informasi tentang gambaran fenomena-fenomena serta fakta-fakta.

B. Wawancara

Adalah pengumpulan data melalui responden dengan cara tanya jawab untuk mendapatkan informasi secara langsung kepada pihak yang memiliki keterkaitan dengan dengan bahasan yang diteliti. selain itu peneliti menggunakan pedoman wawancara agar informasi yang diberikan menggambarkan informasi jelas terhadap fenomena-fenomena dari objek penelitian.

C. Dokumentasi

Adalah untuk pengumpulan data primer dan data sekunder, penulis menganalisa dokumen dalam bentuk tulisan atau berupa foto-foto kegiatan yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* Di Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu.

3.5 Validitas Data

Validitas merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antara yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian.

Triangulasi teknik, yang artinya peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi untuk sumber data yang sama dengan pertimbangan sumber informasi yang dapat digali dari beberapa responden agar dapat diverifikasi tingkat kebenarannya.

3.6 Analisis Data.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting serta mana yang perlu dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami (Sugiyono, 2007: 333-345). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang digunakan peneliti sebagaimana yang dikemukakan Miles dan Hubberman (Sugiyono, 2007: 204) yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan penyerderhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan dan keabsahan data mentah menjadi informasi yang bermakna, sehingga memudahkan penarikan kesimpulan.

b. Penyajian data

Penyajian data yang sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk naratif. Penyajian-penyajian data berupa sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengaju pada rumusan masalah secara tujuan yang hendak dicapai. Data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

3.7 Lokasi Penelitian

Lokasi Yang Akan Di Jadikan Obyek Penelitian Ini Adalah Kantor Camat Di Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu. Yang Bertempat Di Jalan Raya Gantar - Indramayu, Gantar, Kec. Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat 45216.

BAB IV

HASIL PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Kecamatan Gantar

Kecamatan Adalah Pembagian Wilayah Administratif Di Indonesia, Di Bawah Kabupaten Atau Kota. Kecamatan Terdiri Atas Desa-Desa Atau Kelurahan-Kelurahan. Kecamatan Atau Sebutan Lain Adalah Wilayah Kerja Camat Sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Kedudukan Kecamatan Merupakan Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Sebagai Pelaksana Teknis Kewilayahan Yang Mempunyai Wilayah Kerja Tertentu Dan Dipimpin Oleh Camat. Gantar Adalah Salah Satu Kecamatan / Camat Yang Ada Di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat.

Kecamatan Gantar Adalah Salah Satu Kecamatan / Camat Yang Ada Di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Melalui Kantor Kecamatan Ini, Warga Dapat Mengurus Berbagai Bentuk Perizinan. Beberapa Perizinan Yang Sering Dibuat Terkait Dengan Penerbitan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK),Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Rekomendasi Surat Pengantar SKCK, Surat Keterangan Domisili, Surat Izin Menutup Jalan Untuk Pembangunan Atau Acara, Pengesahaan Surat Keterangan Miskin, Dispensasi Nikah, Rekomendasi Dan Pengesahaan Permohonan Cerai, Belum Nikah, Dan Nikah. Surat-Surat Lainnya Yang Dapat Diurus Terkait Perizinan Tertentu Seperti Surat Eksplorasi Air Tanah, Penggalian Mata Air, Surat Perubahan Penggunaan

Tanah, Waris, Hingga Wakaf. Ada Banyak Fungsi Dan Tugas Lain Dari Kantor Kecamatan.

Luas Wilayah Kecamatan Gantar Terdiri Dari 7 Desa Dan Luas Wilayah Sebesar 227,35 Km². Berdasarkan Posisi Geografisnya, Kecamatan Gantar Memiliki Batas-Batas: Utara – Kecamatan Haurgeulis; Selatan – Kabupaten Sumedang; Barat – Kabupaten Subang; Timur – Kecamatan Kroya Dan Terisi.

Tabel 4.1.1 1 Luas Wilayah Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu

Kelurahan/Desa	Luas (Km²)	Persentase Terhadap Luas Kecamatan
(1)	(2)	(3)
1. Bantarwaru	24,04	10,57
2. Sanca	54,45	23,95
3. Mekarjaya	30,45	13,38
4. Gantar	30,32	13,35
5. Situraja	27,74	12,20
6. Beleraja	26,19	11,52
7. Mekarwaru	34,18	15,03
Kecamatan gantar	227,35	100,00

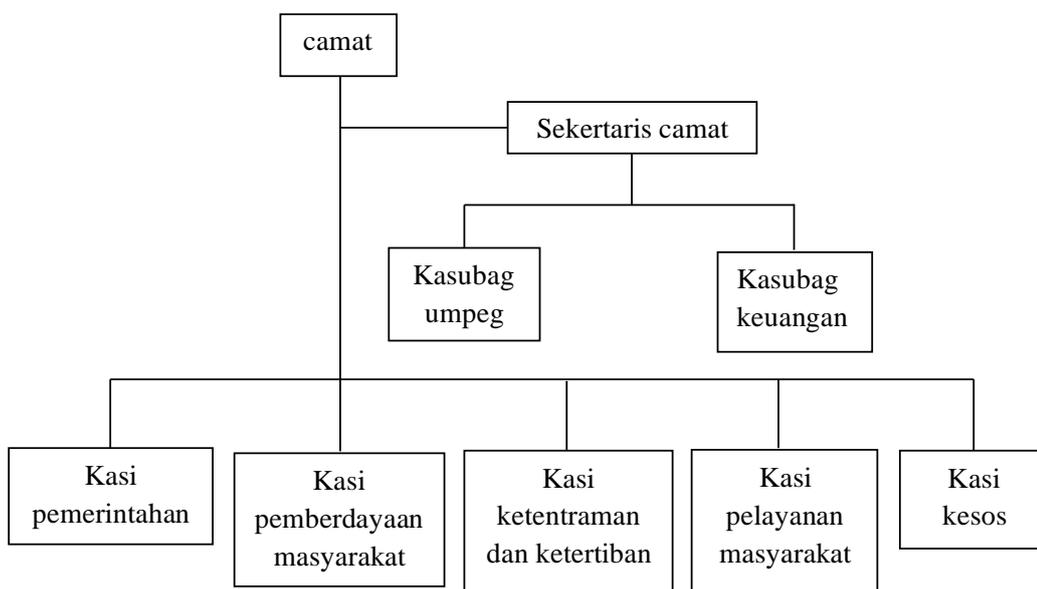
Sumber: Kementerian Dalam Negeri/Ministry of Home Affairs & BPS Tahun 2022

Dari Tabel Diatas Dapat Kita Ketahui Bahawa Desa Bantarwaru Adalah Desa Dengan Luas Wilayah Terkecil Yaitu 10,57 KM². Sedangkan, Desa Sanca Adalah Desa Dengan Luas Wilayah Terbesar Yaitu 23,95 KM².

4.1.2. Tugas Pokok dan fungsi Kecamatan Gantar

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah kabupaten di wilayah kerjanya, yang mencakup bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, kesejahteraan rakyat dan pembinaan kehidupan masyarakat serta urusan pelayanan umum lainnya.

Gambar 4.1.2 1 Struktur Organisasi Kecamatan Gantar



1. Camat

Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerinyahan

2. Sekretaris Kecamatan

Membantu Camat dalam memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, informasi kehumasan dan

ketatausahaan serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum, informasi kehumasan dan kepegawaian dilingkungan Kecamatan.

4. Sub Bagian Keuangan

Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan.

5. Kasi Pemerintahan

Kasi Pemerintahan adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis yang membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan desa.

6. Kasi Pemberdayaan Masyarakat

Kasi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, ekonomi dan pembangunan serta pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di lingkungan kelurahan. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Melaksanakan sebagian tugas Camat dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat,

perekonomian, pembangunan desa/ kelurahan, sosial, peningkatan sarana prasarana fasilitas umum serta lingkungan hidup.

7. Kasi pelayanan masyarakat

Kasi pelayanan masyarakat bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas pelayanan sosial kemasyarakatan dan peningkatan kapasitas. Selain tugas tersebut, Kasi Pelayanan juga bertugas : melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya.

8. Kasi Kesos

Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program pembinaan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga; Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Kesejahteraan Sosial di kecamatan kepada Bupati; dan. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

4.1.3. Visi Dan Misi Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu

Visi dari kecamatan gantar Kabupaten Indramayu yaitu: “INDRAMAYU BERMARTABAT” (Bersih, Religius, Maju, Adil, Makmur dan Hebat.)

Adapun Misi dari kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu yaitu: “SAPTA NATA MULIA JAYA” (Tujuh Penataan Menuju Mulia dan Jaya)

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, melindungi, bersih, bebas korupsi, kolusi, nepotisme, transparan, akuntabel, profesional dan demokratis.

2. Peningkatan pelayanan kehidupan beragama, kepercayaan, pemahaman, dan pengalaman agama, serta kerukunan hidup antar umat beragama dan budaya dalam bingkai kebangsaan bhineka tunggal ika.
3. Terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan dalam jumlah dan kualitas yang memadai dan merata.
4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang layak sebagai upaya penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan sumber daya sehingga mampu berdikari.
5. Peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.
6. Peningkatan pelaksanaan pembangunan disegala bidang sehingga terpenuhinya kebutuhan masyarakat secara adil dan merata.
7. Mewujudkan indramayu sebagai daerah yang unggul dan memiliki daya saing melalui kemandirian ekonomi berbasis sumber daya alam dan pengembanaan industri pertanian, perikanan, dan migas.

4.1.4. Keadaan Pegawai Kantor Kecamatan Gantar

Kantor Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu Untuk Dapat Melaksanakan Tugas Pokoknya Membutuhkan Petugas Yang Mampu Melaksanakan Peran Dan Fungsinya Dengan Baik, Dalam Arti Petugas Mempunyai Kemampuan, Pengetahuan Dan Keahlian Serta Rasa Disiplin Yang Tinggi Didalam Melaksanakan Tugas Yang Menjadi Beban Tanggung Jawabnya Sehingga Dapat Berjalan Dengan Lancar.

Untuk lebih jelasnya penulis sajikan tabel yang berisikan tingkat pendidikan para petugas pada Kantor Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu sebagai berikut:

Tabel 4.1.4 1 Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pada Kantor Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Sekolah Dasar (SD)	0
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	0
3	Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK)	8
4	Diploma I,II/Akta I,I,diploma I,II/Akta I,II	0
5	Diploma III/Akta III/Sarjana Mudadiploma III/Akta III/Bachelor	1
6	Tingkat Sarjana/ Doktor/Ph.Duniversity Graduates	12
Jumlah		21

Sumber: Kantor Kecamatan Gantar kabupaten indramayu, Tahun 2022

Dari Tabel Diatas Dapat Kita Ketahui Bahwa Keadaan Pegawai Pada Kantor Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu Berdasarkan Pendidikan, Bisa Dikatakan Sudah Baik Dan Berpendidikan Tinggi Terbukti Dari 21 Pegawai Terdapat 8 Orang Yang Berpendidikan SMA/SMK, Dan 1 Orang Berpendidikan Diploma III, Selanjutnya 12 Orang Berpendidikan Sarjana. Seperti Kita Ketahui Bahwa Pendidikan Itu Penting Dalam Mengembang Suatu Pekerjaan, Semakin Tinggi Pendidikan Seseorang Maka Kualitas Pekerjaan Yang Diberikan Akan Lebih Baik Pula.

Untuk mengetahui perkembangan mengenai golongan Pegawai Pada Kantor Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu. diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.1.4 2 Keadaan pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan Pada Kantor kecamatan Gantar Kabupaten indramayu

No	Tingkat Pangkat Golongan	Jumlah
1	GOLONGAN I	
	(I/A) Juru Muda	0
	(I/B) Juru Muda Tk.I	0
	(I/C) Juru	0
	(I/D) Juru Tk.I	0
2	GOLONGAN II	
	(II/A) Pengatur Muda	0
	(II/B) Pengatur Muda Tk.I	1
	(II/C) Pengatur	2
	(II/D) Pengatur Tk.I	5
3	GOLONGAN III	
	(III/A) Penata Muda	2
	(III/B) Penata Muda Tk. I	4
	(III/C) Penata	2
	(III/D) Penata Tk.I	3
4	GOLONGAN IV	
	(IV/A) Pembina	2
	(IV/B) Pembina Tk. I	0
	(IV/C) Pembina Muda	0
	(IV/D) Pembina Madya	0
	(IV/E) Pembina Utama	0
Jumlah		21

Sumber: Kantor Kecamatan Gantar kabupaten indramayu, Tahun 2022

Dari Tabel Di Atas Terlihat Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan/Pangkat Yang Paling Banyak Adalah Pegawai Dengan Golongan III Berjumlah 11 Orang, Golongan II 8 Orang, Golongan IV Hanya 2 Orang, Dengan Tabel tersebut Jumlah Total Keadaan Pegawai Pada Kantor Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu 21 Orang.

Serta komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1.4 3 Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Kantor Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu

No	Tingkat Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	19
2	Perempuan	2
Jumlah		21

Sumber: Kantor Kecamatan Gantar kabupaten indramayu, Tahun 2022

Dari Tabel Di Atas Terlihat Pegawai Kantor Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu Berdasarkan Jenis Kelamin Yaitu 19 Orang Laki-Laki Dan 2 Orang Perempuan. Dengan Demikian Maka Pegawai Berjenis Kelamin Laki-Laki Lebih Mendominasi Dalam Lingkungan Kantor Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu.

4.1.5. Jumlah penduduk Dikecamatan Gantar

Penduduk Kecamatan Gantar Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk Pada Tahun 2020 Sebanyak 61.190 Jiwa Yang Terdiri Atas 30.892 Jiwa Penduduk Laki-Laki Dan 30.298 Jiwa Penduduk Perempuan.

Tabel 4.1.5 1 Jumlah Penduduk Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	30,892
2	Perempuan	30,298
Jumlah		61,19

Sumber: Disdukcapil & BPS Kabupaten Indramayu, Tahun 2022

Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu Mengkonfirmasi Kasus Penularan Covid-19 Pertanggal 01 September 2021 – 26 Febuari 2022 Tercatat Diagnosis Kontak Erat Sebanyak 197 orang Dan Diagnosis Suspek 45 orang. Total Kasus dalam spesimen sebanyak 242 orang. Berikut Tabel Sebaran Per Kecamatan Covid-19 Di Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu Sebagai Berikut:

Gambar 4.1.5 1 Data Kasus Covid-19 Di Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu

Data Kasus Virus Corona Disase (Covid-19) Di Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu		
No.	Pengambilan Spesimen 01 September 2021 - 26 Febuari 2022	
1	Laki-Laki	125
	Perempuan	117
	Jumlah	242
Diagnosis Laki-laki Dan Perempuan		
2	Diagnosis Kontak Erat	197
	Diagnosis Suspek	45
	Jumlah	242

Sumber: Puskesmas Kecamatan Gantar

4.2 Pembahasan

Penelitian Ini Merupakan Penelitian Yang Bersifat Deskriptif Tentang, Implementasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat) Dalam Penanganan Virus Corona Disease 2019 (Covid-19) Di Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu, Sehingga Peneliti Berusaha Untuk Menggali, Mengungkap Kemudian Mendeskripsikannya. Hasil Penelitian Ini Berupa Data Data Yang Diperoleh Melalui Wawancara, Dokumentasi, Dan Obervasi.

Melalui Implementasi Kebijakan, Akan Dikaji Berbagai Masalah Yang Berkaitan Dengan Implementasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat) Dalam Penanganan Virus Corona Disease

2019 (Covid-19) Di Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu. Adapun Hasil Penelitian Dan Pembahasan Mengenai Implementasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat) Dalam Penanganan Virus Corona Disease 2019 (Covid-19) Di Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu Dengan Menggunakan Teori Dari George Edwar III Dengan 4 Indikator Yaitu Sebagai Berikut :

4.2.1 Komunikasi

Komunikasi Merupakan Salah Satu Aspek Yang Mempengaruhi Keberhasilan Suatu Pelaksanaan Kebijakan. Komunikasi Sangat Menentukan Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dari Pelaksanaan. Pelaksanaan Yang Efektif Terjadi Apabila Para Pembuat Keputusan Sudah Mengetahui Apa Yang Akan Dikerjakan. Pengetahuan Atas Apa Yang Akan Dikerjakan Dapat Berjalan Apabila Komunikasi Berjalan Dengan Baik, Sehingga Setiap Keputusan Dan Peraturan Pelaksanaan Harus Dikomunikasikan Kepada Bagian Personalia Yang Tepat. Dengan Kata Lain, Tujuan, Sasaran, Dan Berbagai Informasi Yang Berkaitan Dengan Kebijakan Harus Ditransmisikan Dengan Baik Dan Benar Untuk Menjamin Keberhasilan Suatu Kebijakan.

Hasil wawancara peneliti dengan informan Camat Gantar Drs. Uus Wuspita hal yang dikemukakan yaitu: “PPKM adalah peraturan langsung dari pusat yang ditetapkan, daerah-daerah yang wajib menjalankan PPKM didaerah masing-masing yang telah di ditetapkan, sehingga dengan adanya inmendagri, Bupati Indramayu langsung mengeluarkan surat edaran tentang PPKM”

Dari hasil wawancara penulis menyimpulkan bahwa komunikasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sangat efektif, Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat adalah kebijakan turunan dari pemerintah pusat yang wajib berlaku di setiap daerah yang angka penularan covid-19 tinggi.

Hasil wawancara peneliti dengan informan Sekretaris Camat Gantar Drs. Edy Wahyono mengemukakan yaitu: kami selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat dengan melaporkan kondisi terkini di kecamatan gantar, sehingga setiap peraturan yang keluar dari pemerintah pusat itu sesuai dengan laporan pemerintah daerah, jadi dapat dipastikan laporan tentang kasus covid-19.

Dari hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa peraturan dari pemerintah pusat yang dituangkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri adalah output dari hasil laporan pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Peneliti menilai bahwa proses komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah dari kecamatan hingga sampai ke masyarakat berjalan dengan baik, Hanya saja proses selanjutnya untuk dikomunikasikan kepada masyarakat yang masih dirasa kurang karena ada beberapa masyarakat yang belum paham dengan benar mekanisme penerapan PPKM, mungkin beberapa masyarakat tidak menggunakan media sosial ataupun malas untuk membaca kebijakan yang dimuat di media sosial, untuk itu diharapkan kedepannya proses komunikasi bisa dilakukan sampai ke ranah yang lebih kecil dan dengan jelas sehingga bagi masyarakat yang mungkin tidak menggunakan media sosial ataupun malas membaca media sosial yang memuat kebijakan PPKM dapat dijangkau.

4.2.2 Sumber daya

Sumber Daya Dalam Mengimplementasikan Sebuah Kebijakan Merupakan Salah Satu Faktor Yang Penting. Sumberdaya Dalam Sebuah Program/ Kebijakan Tidak Hanya Sumber Daya Manusia Saja, Melainkan Sarana Dan Prasarana Juga Merupakan Faktor Yang Mendukung Keberhasilan Suatu Program.

Hasil wawancara peneliti dengan informan Sekretaris Drs. Edy Wahyono Mengemukakan yaitu: Dalam Hal PPKM ini Pemerintah Kota Bekerjasama dengan Pemetintahan daerah, Polsek, Satgas, OPD (Dinas Terkait), Satpol PP Kecamatan Gantar, saya rasa dengan perangkat tersebut mampu menjadi penopang ketika dilapangan karena masing-masing memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda.

Dari hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa pemerintah kecamatan Gantar Kabupaten Indramyu menyediakan sumber daya yang lengkap, dalam hal ini sumber daya manusia yang mampu menopang dengan porsi kerja masing masing untuk menjalankan kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.

Hasil wawancara peneliti dengan informan mengemukakan yaitu: pemerintah juga membuat POSKO RT/RW atau PPKM Micro sampai ke tingkat Kecamatan turun kekelurahan, kelurahan turun ke RT/RW rata-rata yang jaga di posko ppkm adalah tokoh masyarakat, dan bukan sekedar posko, mereka turun memberikan himbauan serta edukasi kepada masyarakat setempat, dan setiap posko memberikan laporan kepada pemerintah untuk di laporkan ke pemerintah pusat.

Dari hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa fasilitas posko yang ditopang petugas posko yaitu mereka yang ditokohkan di wilayahnya masing-masing sehingga mampu memberikan pemahaman dengan menyesuaikan dengan sikap warga yang tokoh masyarakat tersebut sudah tahu beberapa karakter masyarakat setempat. peneliti menilai bahwa proses Sumber daya juga merupakan

faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan. Tanpa sumber daya yang memadai, pelaksanaan kebijakan akan terhambat. Sebaik apapun kebijakan tersebut, jika sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya terbatas, maka pencapaian tujuannya akan terganggu, begitu pun dalam Implementasi kebijakan PPKM yang kali ini peneliti melaksanakan penelitian dikecamatan Gantar Kabupaten Indramayu. Dalam pelaksanaannya memerlukan sumber daya manusia, sumber daya anggaran (dana), sumber daya sarana, prasarana dan kemudian Informasi. sumber daya ini sangat penting untuk saling melengkapi. Jika terdapat kekurangan pada salah satunya maka dapat menghambat proses pelaksanaan kebijakan secara keseluruhan. Sumber daya manusia atau sumber daya pendukung seperti fasilitas, dana, dan informasi harus tersedia atau terpenuhi dengan baik sehingga menghasilkan output sesuai dengan apa yang diharapkan baik pemerintah maupun masyarakat.

4.2.3 Disposisi/ Sikap pelaksana

Sikap Pelaksana Adalah Faktor Ketiga Yang Mempengaruhi Suatu Kebijakan Selain Komunikasi Dan Sumber daya. Sikap Pelaksana Yaitu Bagaimana Komitmen Dan Respon Pelaksana Kebijakan Dalam Menjalankan Peraturan. Apabila Aparat Pelaksana Memiliki Sikap Yang Baik Maka Dia Akan Dapat Menjalankan Kebijakan Dengan Baik Seperti Apa Yang Diinginkan Oleh Pembuat Kebijakan. Sebaliknya Jika Sikap Dan Perspektif Yang Berbeda Dengan Pembuat Kebijakan, Maka Proses Implementasi Kebijakan Juga Akan Menjadi Tidak Efektif. Komitmen Yang Baik Diharapkan Menjadi Efek Yang Baik Pula

Dalam Pelaksanaan Suatu Kebijakan. Namun Komitmen Yang Kurang Baik Akan Memperlambat Atau Juga Bahkan Memperburuk Suatu Keadaan.

Hasil wawancara peneliti dengan informan kasatgas Kecamatan Gantar Drs. Syarif Hidayat mengemukakan bahwa: biasanya kalau tahap sosialisasi semua pelaku usah mengiyakan PPKM tersebut dan siap melaksanakan peraturan itu, tapi pada saat kami melakukan Razia tidak sedikit juga pelaku usaha atau masyarakat yang melanggar yang kebanyakan itu Tempat hiburan malam, café, warkop, yang betul betul melawan petugas.

Dari hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa adanya hal hal yang tidak diinginkan disebabkan karena bentuk perlawanan dari belah pihak pelaku usaha yang berusaha mempertahankan usahanya dan juga mendapatkan respon dari petugas yang berusaha untuk menjalankan tugasnya.

Hasil wawancara peneliti dengan informan Masyarakat pemilik café “De’ green café & resto mengutarakan yaitu: awalnya kita diberitahukan tentang PPKM jadwal tutup, selanjutnya petugas datang untuk berpatroli mengingatkan jam oprasionnal sebefore jamnya, dan kalau masih melanggar mereka ambil kursi disita, kalau untuk sampai ketahap cafe ditutup tidak pernah karna kami pada saat setelah kursi di ambil kami menutup cafe sesuai dengan aturan jam oprasional.

Dari hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa sikap pelaksana dapat diukur dari respon dari pelanggar kebijakan sehingga Tindakan-tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan perpektif masyarakat. Dalam penerapan itu melibatkan Satpol PP, Polsek dan untuk patroli atau oprasi tim dan penindakan, diberitahukan tentang PPKM jadwal tutup mengingatkan jam oprasionnal sebefore jamnya, dan kalau masih melanggar mereka diberikan sanksi, sesuai dengan aturan jam oprasional. Meskipun disposisinya datang dari dalam diri atau kemauan para pelaksana kebijakan demi menangani covid-19, bukan berarti kehadirannya tidak

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Dari hasil penelitian yang dilakukan terlihat bahwa penanganannya sudah cukup baik dimana media edukasinya berasal dari televisi, media sosial, internet, spanduk dan juga sosialisasi yang dilakukan secara langsung oleh pemerintah tetapi mungkin bisa diperhatikan lagi untuk pemberian insentif sehingga menambah motivasi. Tetapi karena ini tugas yang penting untuk kesehatan, keamanan, dan ketertiban bersama jadi mereka bersedia untuk melakukan tugas ini demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

4.2.4 Struktur Birokrasi

Menurut George C. Edward III, Walaupun Sumber-Sumber Untuk Melaksanakan Suatu Kebijakan Tersedia Atau Para Pelaksana Mengetahui Apa Yang Seharusnya Dilakukan Dan Mempunyai Keinginan Untuk Melaksanakan Suatu Kebijakan, Kemungkinan Kebijakan Tersebut Tidak Dapat Terlaksana Karena Terdapatnya Kelemahan Dalam Struktur Birokrasi.

Kemungkinan Suatu Kebijakan Tidak Dapat Berjalan Karena Terdapat Kelemahan Dalam Struktur Birokrasi. Aspek Dalam Implementasi Adalah Mekanisme Biasanya Sudah Dibuat Standart Operating Procedure (SOP), SOP Yang Menjadi Pedoman Bagi Setiap Implementor Dalam Bertindak Agar Dalam Pelaksanaan Kebijakan Tidak Melenceng Dari Tujuan Dan Sasaran Kebijakan. Para Pelaksana Kebijakan Dalam Melaksanakan Suatu Harus Sesuai Pada SOP.

Hasil wawancara peneliti dengan informan Drs. Edy Wahyono mengemukakan yaitu: dalam hal menjalankan aturan PPKM ini kami punya tahapan tahapan, Tahapan pertama sosialisasi tentang PPKM, yang kedua Ketika dalam 3 hari setelah sosialisasi dan tempat tersebut melanggar maka di berikan

peringatan berupa menyita kursi tempat minimal 10 kursi yang disita, yang ke tiga, Ketika masih melanggar tempat tersebut di tutup atau pencabutan surat izin usaha.

Dari hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa petugas dalam menajalan kebijakan tersebut memiliki tahapan yang tidak langsung menggunakan otoritas jabatannya untuk bertindak, sehingga masyarakat tidak merasa heran pada kebidakan PPKM.

Hasil wawancara peneliti dengan informan mengemukakan yaitu: dalam tahapan tahapan PPKM kami terus mengedepankan pendekatan persuasif, dan sosialisasi, untuk memkai kewenangan adalah tahap terakhir Ketika dianggap perlu. Dan kami usahakan untuk tidak menggunakan otoritas dalam proses PPKM ini dikarenakan kami juga memandang kondisi masyarakat dan kondisi kita semua yang terdampak covid-19 mau tidak mau kita semua beruang untuk hidup dan sehat

Dari hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa dengan pendekatan persuasive dapat menyentul langsung kepada masyarakat dan dengan pendekatan sosialisasi saling mengingatkan akan pentingnya kebijakan terebut untuk menekan angka penularan covid-19 dan tetap memberikan ruang ekonomi bagi masyarakat.

Hasil wawancara peneliti dengan informan kasatpol PP Kecamatan Gantar Edi Juraedi, S.IP mengemukakan yaitu: untuk menjalankan atau menegakkan aturan PPKM ini kami selalu bersikap humanisme dan menghindari Tindakan tidakan yang sepihak dikarenakan seragam sesuai dengan arahan Bupati Indramayu Ketika kita di kumpulkan beliau mengatakan ada 3 tips yaitu: mengendalikan diri, kesabaran, dan sikap professional. Dan itu yang kami pegang teguh.

Dari hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa hal yang di dahulukan adalah bagaimana bersikap humanis terhadap masyarakat sesuai dengan himbauan Bupati Indramayu demi menjaga keamana dan kenyamanan masyarakat Khususnya di kecamatan gantar Kabupaten Indramayu. Birokrasi merupakan

struktur tatanan organisasi yang dibentuk dan disusun untuk mencapai berbagai tujuan serta untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur. Implementasi kebijakan pemerintah yang baik dan terarah menuntut adanya kerjasama yang baik Pemerintah kecamatan Gantar. Dalam pembentukan struktur birokrasi dalam pertanyaan mengenai sumberdaya, disini juga melibatkan masyarakat sehingga ada keterwakilan dalam proses penanganan covid ini, nah untuk struktur dari gugus tugas yang diatur oleh pemerintah yang ada di atasnya maka ditingkat kecamatan itu setiap kecamatan diketuai oleh camat itu sendiri dan ditingkat kelurahan membentuk tim yang melibatkan juga masyarakat yang selanjutnya bertindak melaksanakan semua kebijakan pemerintah pusat dalam hal PPKM ini.

Dalam penelitian ini yang menjadi faktor berjalannya implementasi peneliti menggunakan pendekatan George Edward III tentang empat indikator implementasi kebijakan. Indikator Komunikasi dalam implementasi kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat daruarta di kecamatan gantar kabupaten indramayu menunjukkan bahwa komunikasi yang berjalan dari pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah pusat dengan pelaksana kebijakan yaitu pemerintah daerah/kota, selain itu komunikasi antar aparat pelaksana di kecamatan gantar berjalan dengan massif dan tepat sasaran, dalam hal ini pemerintah mampu bersosialisasi kepada masyarakat dengan berbagai cara seperti, berkeliling dengan menggunakan oprasional dan menggunakan pengeras suara dengan menyuarakan kepada masyarakat tentang kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat, dan untuk pelaku usaha dengan cara *door to door* atau langsung menghampiri tempat tempat

usaha yang ada di kecamatan gantar kabupaten indramayu dengan memberikan himbauan kepada mereka tentang poin poin pembatasan kegiatan masyarakat yang perlu di jalankan bagi pelaku usaha.

Pada indikator sumber daya dalam implementasi kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat menunjukkan bahwa sumber daya fasilitas dan sumber daya manusia yang memumpuni sehingga dalam pelaksanaan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat dapat berjalan, sumber daya manusia seperti elemen yang terlibat adalah perangkat daerah yang sesuai dengan profesi tentang pembatasan kegiatan masyarakat, seperti Satgas, Dinas Kesehatan, Satpol PP dan Polsek, OPD (Dinas Terkait), Selain itu sumber daya fasilitas pada kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat seperti adanya honor bagi implementor, posko kecamatan, dan kendaraan oprasional yang menjadikan setiap implementor dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Pada indikator sikap pelaksana menunjukkan bahwa tidak komitmen dalam menentukan tim yang bertugas dalam menegakkan ppkm tersebut sehingga muncul pemikiran yang ambigu bagi masyarakat dalam menghadapi petugas yang menjalankan penegakkan kebijakan PPKM, ditambah lagi sikap dari penegak ppkm yang mudah terpacung emosi sehingga rawan terjadi konflik dalam menegakkan ppkm tersebut.

Pada indikator struktur birokrasi menunjukkan bahwa setiap perangkat paham akan tugas dan fungsinya yang di himbau langsung dari bupati indramayu, sehingga dalam pelaksanaanya tertata dengan adanya himbauan tersebut.

Pemerintah kecamatan setiap saat mengevaluasi dan juga membekali seluruh perangkat yang terlibat.

Yang menjadi faktor pendukung dari implementasi kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di kecamatan gantar kabupaten indramayu menunjukkan bahwa, alam dan adanya peraturan yang tertuang dalam Intruksi menteri dalam negeri yang menjadi landasan terbiatnya surat edaran ppkm, dan juga adanya sumber daya yang mampu menjadi pengaruh kelancaran menajnlankan kebijakan ppkm mulai dari fasilitas, dan juga perangkat yang terlibat sesuai dengan tugas dan skil masing masing.

Yang menjadi faktor penghambat dari implementasi kebijakan pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat di kecamatan gantar kabupaten indramayu menunjukkan bahwa pemerintah kecamatan gnatar yaitu medan kebanyakan hutan dan jalan, tidak komitmen dalam menentukan tim satuan tugas yang membuat masyarakat semeakin ambigu, dan juga sikap petugas yang mudah terpancing dengan tindakan masyarakat sehingga rawan menjadi konflik, di tambah dengan masyarakat yang kurang kooperatif pada kebijakan PPKM ini.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat) di kecamatan gantar kabupaten indramayu menunjukkan bahwa terimplementasi dengan menggunakan pendekatan 4 variabel.

Komunikasi mampu berkoordinasi dengan tepat kepada aparat yang terlibat seperti Satgas, Dinas Kesehatan, Satpol PP dan Polsek, OPD (Dinas Terkait), sehingga mampu menekan angka penularan covid-19 tanpa mengabaikan kegiatan perekonomian masyarakat.

Sumber daya yang lengkap dalam hal ini sumber daya fasilitas dan sumber daya manusia seperti adanya honor untuk petugas yang sedang menjalankan PPKM dan pemerintah pusat berkolaborasi dengan kecamatan gantar, Satgas, Dinas Kesehatan, Satpol PP dan Polsek, OPD (Dinas Terkait) untuk menjalankan kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Untuk menjalankan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan kegiatan Masyarakat darurat selain itu Pemerintah Menyediakan posko tingkat RT/RW.

Sikap Pelaksana dalam proses menjalankan PPKM sikap aparat yang mengedepankan persuasif akan tetapi beberapa pelaku usaha sampai

ke masyarakat yang berupaya untuk melanggar kebijakan bahkan melawan peraturan kebijakan. Struktur Birokrasi, pemerintah kecamatan melakukan beberapa tahapan untuk menindak sebelum memberikan sanksi sehingga untuk menggunakan kewenangan adalah tahap terakhir Ketika di perlukan.

2. Faktor Pendukung dalam Implementasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM daruurt) di kecamatan gantar kabupaten indramayu dengan adanya sumber daya manusia dan sumber daya fasilitas. Sumber daya fasilitas seperti anggaran yang cukup bagi pelaksana kebijakan dan penyediaan posko RT/RW dan sumber daya manusia, tidak terlepas dari Oraganisasi Masyarakat, Satgas, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Polsek, OPD (Dinas Terkait). Kolabiarasi komponen tersebut menjadi satu kesatuan yang tidak bisa di pisahkan satu sama lain dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam memutus mata rantai penularan covid-19 di Kecamatan gantar kabupaten indramayu.
3. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM daruurt) di kecamatan gantar kabupaten indramayu adalah Medan dan respon masyarakat yang terhadap kebijakan PPKM sangat kurang sehingga berpengaruh kepada sikap pelaksana yang harus melakukan Razia, bahkan sampai bersentuhan fisik antara petugas dengan masyarakat atau pelaku usaha.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah kecamatan gantar kabupaten indramayu dan seluruh perangkat yang terlibat dalam hal ini agar tetap saling berkoordinasi untuk mencapai tujuan dari pada kebijakan ini.
2. Kepada Pihak yang menegakkan PPKM ini tetap selalu mengedepankan pendekatan Persuasif dan sosialisasi demi menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat di kecamatan gantar kabupaten indramayu.
3. Pemerintah kabuptaen indramayu perlu memberikan edukasi kepada masyarakat terkhususnya pelaku usaha untuk dapat lebih kooperatif.
4. Masyarakat kecamatan gantar harus lebih taat terhadap aturan dan saling mnngingatkan satu sama lain demi memutus mata rantai Pandemi Covid-19.
5. Kepada seluru masyarakat kabupaten indramayu agar sekiranya mematuhi protokol kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin (2008). *Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Asep Saepul Hamdi dan E. Baharuddin. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Carl J. Friedrich Dalam Leo, 2008:3, *Man and Hts Government*, New York: McGraw, Hill.
- Dr.Arifin Tahir, M.Si., 2014, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Daerah*, Bandung, ALFABETA.
- Edward III. C. George. 1980. *Implementation public policy*. Washington: Congressional Q Press.
- Edwards III, George C. 2003. *Implementing Public Policy*. Jakarta.
- Gie, The Liang 1980. “ *Dasar-Dasar Administrasi, Suatu Kumpulan Karangan Di Daerah* ” Jakarta : Pradnya Paramita.
- Hessel Nogi S. Tangkilisan, 2003. *Implementasi kebijakan publik (Transformasi pikiran George Edward)*. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI).
- Leo, Agustino. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Mulyadi, D. 2015. *Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan*. Bandung: Alfbeta.
- Siagian, Sondang P. 1980. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Silalahi Ulbert. 2016. *Studi tentang ilmu administrasi publik*. Sinar Baru Algensindo.

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Widodo, J. (2021). *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).

Winarno, B. (2007). *Kebijakan publik: Teori dan proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Peraturan Perundang-undangan:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 *tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali*.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 *Tentang Perubahan atas keputusan presiden nomor 7 Tahun 2020 Tentang tugas percepatan penanganan corona virus disease 2019 (covid-19)*
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 *Tentang Pembatasan Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*
4. Peraturan Gubernur Nomor: 443/Kep.337-Hukham/2021 *Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Di Daerah Provinsi Jawa Barat*.
5. Peraturan bupati indramyu NOMOR: 443/Kep. 291-Dinkes/2021 *Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Indramayu*.